

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Konsep teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan atau kontrak keagenan antara dua pihak yaitu pihak *principal* dan pihak agen. Dalam teori ini, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya pemberian sebuah kekuasaan atau wewenang dari pihak *principal* kepada pihak agen. Wewenang *principal* kepada agen tersebut untuk menjalankan tugas atau target tertentu sesuai dengan kepentingan *principal* yang harus diselesaikan secara periodik. Robert dan Pagalung (2011) berpendapat bahwa modal dalam perusahaan berasal dari berbagai macam sumber, salah satu sumber modal perusahaan yaitu saham. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, maka pemegang saham bertindak selaku pihak *principal* sedangkan CEO (*Chief Executive Officer*) yang bertindak selaku agen.

Kepentingan individu akan menimbulkan sebuah konflik atau ketidakseimbangan informasi antara *principal* dengan agen. Hal ini disebabkan karena *principal* atau pemegang saham hanya selaku pengawas terhadap kinerja CEO, seperti memaksimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memberi motivasi bagi agen untuk mencapai target yang diberikan (Robert dan Pagalung, 2011). Pengawasan dan motivasi ini

dilakukan agar *principal* tidak ingin merasa dirugikan setelah menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

CEO yang menjalankan aktivitas perusahaan dituntut untuk menghasilkan laba perusahaan secara optimal, namun pada kenyataannya laba perusahaan yang dihasilkan belum tentu mencapai target yang diinginkan oleh *principal*. Fenomena ini sering digunakan oleh agen untuk melaksanakan praktik manajemen laba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual (Putri, 2017). Hal ini dikarenakan agen mempunyai informasi yang lebih luas dan mendetail mengenai kondisi dan situasi perusahaan, sehingga kondisi tersebut dapat memicu tindakan atau praktik manajemen laba. Praktik manajemen laba ini dilakukan agen untuk memberikan laporan keuangan dengan laba perusahaan yang cenderung stabil atau meningkat untuk memenuhi kepentingan *principal*. Akan tetapi, agen tidak memperhatikan dampak yang akan timbul dalam jangka panjang apabila praktik manajemen laba ini diterapkan dalam menyusun sebuah laporan keuangan.

Pada perusahaan sektor industri perbankan, mengaplikasikan teori keagenan menjadi sangat unik karena pada perusahaan industri perbankan ini memiliki tingkat regulasi yang sangat ketat dibanding perusahaan lainnya atau perusahaan non-perbankan. Menurut Indriani (2010), dengan adanya regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan, biasa disebut dengan regulator. Perantara pemerintah melalui Bank Indonesia

(BI) yang berperan sebagai prinsipal dan bank-bank yang terdapat di Indonesia sebagai agennya (Setiawati, 2010). Bank Indonesia bertugas untuk mengawasi kegiatan dan kinerja perbankan di Indonesia sesuai yang telah ditetapkan pada pasal 8 UU BI. Teori agensi menyatakan bahwa konflik antara *principal* dengan agen dapat berkurang dengan adanya mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan pada suatu perusahaan.

2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa kondisi ekonomi memiliki hubungan dengan aktivitas manajemen perusahaan atau pembuat laporan keuangan (Watt dan Zimmerman, 1986). Teori akuntansi positif ini dapat dijadikan sebuah landasan untuk membuat keputusan mengenai kebijakan akuntansi. Selain itu, teori akuntansi positif juga menjelaskan mengenai praktik manajemen laba, dimana manajemen laba merupakan cerminan dari aktivitas pemanipulasian data pada laporan keuangan yang dilakukan secara sadar oleh manajemen mengenai pengungkapan usaha yang sedang dilakukan pada periode tertentu. Beberapa aspek yang mendorong praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan yaitu:

1. Bonus Plan Hypothesis (Motivasi Bonus)

Konsep ini membahas mengenai bonus yang dijanjikan oleh pemilik perusahaan kepada manajemen perusahaan, yang mana dalam memberikan bonus tersebut memiliki dampak positif, disisi lain bonus

yang diberikan memiliki dampak negatif juga. Dampak dari sisi positifnya yaitu manajemen perusahaan akan merasa terpacu dengan adanya bonus tersebut untuk memberikan kinerja yang optimal kepada perusahaan. Namun secara bersamaan, manajemen perusahaan akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba atau kecurangan terhadap laporan keuangan hanya demi kepentingan bonusnya saja. Manajemen perusahaan akan lebih leluasa untuk memainkan angka-angka pada laporan keuangan seperti menggeser laba pada periode mendatang ke periode sekarang. Dengan adanya praktik manajemen laba ini informasi-informasi yang tertuang pada laporan keuangan menjadi tidak akurat dan relevan lagi.

2. *Debt to Equity Hypothesis* (Hipotesis hutang atau ekuitas)

Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, sehingga perusahaan cenderung lebih memilih untuk menggunakan metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Keuntungannya berupa permainan laba agar kewajiban utang-piutang tersebut dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya cenderung memperoleh informasi yang keliru. Akibatnya akan terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya, misalnya konsep ini

diterapkan pada sebuah perusahaan agar dapat menarik para investor supaya tertarik untuk menanamkan sebagian dari modalnya untuk perusahaan tersebut. Selain itu manajemen laba juga dilakukan untuk memenuhi perjanjian utangnya agar meloloskan perusahaan dari kesulitan keuangan.

3. *Political Cost Hypothesis* (Motivasi Politik)

Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode akuntansi yang dapat memperkecil yang dilaporkannya. Dalam hal ini, manajemen perusahaan melakukan pelanggaran regulasi dari pemerintah, seperti undang-undang perpajakan. Manajemen perusahaan akan memperkecil atau menurunkan nilai besaran laba yang diperoleh periode tertentu agar kewajiban dalam pembayaran pajak periode tersebut tidak terlalu tinggi, sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan. Selain itu, dengan memperkecil laba yang dihasilkan dilakukan agar mendapatkan kemudahan dan fasilitas dari pemerintah.

3. Struktur Kepemilikan Perbankan

Struktur kepemilikan saham perbankan dikategorikan menjadi beberapa struktur kepemilikan. Pada penelitian ini di khususkan pada dua kepemilikan yaitu kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan asing. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh pihak eksternal perusahaan pada akhir tahun (Putri dan Yuyyeta, 2013). Contoh

kepemilikan saham oleh institusi yaitu saham yang dimiliki oleh perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan misalnya perusahaan bank lainnya, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi serta yayasan. Sedangkan kepemilikan asing adalah proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing pada akhir tahun. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 pihak asing yang dimaksud adalah warga negara, badan usaha dan pemerintah asing yang berdomisili di luar negeri kemudian menanamkan sebagian dari modalnya berupa rupiah ataupun mata uang asing itu sendiri pada perusahaan di Indonesia.

Tujuan atas kepemilikan saham oleh institusional dan asing adalah sebagai pengawasan (Andra dan Rohman, 2013). Dalam hal ini manajemen perusahaan diawasi oleh pemegang saham dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dan kepemilikan asing merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi adanya konflik antara manajemen dan pemegang saham (Putri, 2017). Hal ini kepemilikan institusional dan kepemilikan asing merupakan suatu mekanisme yang dapat meminimalisir konflik antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Pemegang saham menanamkan modalnya dengan tujuan untuk mendapatkan profit dan nilai pengembalian atas investasinya, sehingga pemegang saham merasa diuntungkan. Oleh sebab itu pemilik perusahaan menginginkan pihak manajemen untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai target tersebut. Perbedaan kepentingan antara

manajemen perusahaan dengan pemegang saham perusahaan dapat diatasi dengan adanya porsi kepemilikan saham oleh institusional dan asing.

4. Kualitas audit

Kualitas audit adalah kemampuan auditor mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan (Indriani, 2010). Laporan keuangan adalah salah satu alat yang dibutuhkan oleh pemegang saham untuk pengambilan keputusan karena laporan keuangan berisi informasi-informasi penting. Kualitas audit yang tinggi dapat membantu meminimalisir ketidakselarasan informasi antara pihak manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Kualitas audit yang tinggi akan membatasi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen sehingga membutuhkan auditor spesialis industri agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan. Chistiani dan Nugrahanti (2014) auditor spesialis industri adalah seorang auditor yang memiliki ciri khas dan karakter tersendiri dalam proses pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan industri kliennya, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor spesialis industri menjadi lebih berkualitas, relevan dan dapat dipercaya sehingga pemegang saham tidak salah dalam pengambilan keputusan.

Peluang mendeteksi kesalahan tergantung pada kompetensi auditor sedangkan keberanian auditor melaporkan kesalahan tersebut tergantung pada independensi auditor. Rahmadika (2011) menyatakan bahwa seorang

auditor spesialisasi industri dalam melayani klien nya berdasarkan dari pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, dapat memahami risiko audit pada industri tersebut. Seperti mendeteksi kesalahan dan kejanggalan pada laporan keuangan yang disajikan akan lebih mudah terkuak sehingga menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas. Apabila laporan keuangan sudah dimanipulasi dengan menaikkan atau menurunkan besaran laba perusahaan, maka informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut menjadi tidak valid dan bias.

5. Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja keuangan merupakan sebuah alat bagi pemegang saham untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan. Menampilkan kinerja yang terbaik adalah tujuan para manajer, baik kinerja jangka pendek maupun jangka panjang (Indriani, 2010). Kinerja keuangan juga digunakan untuk membuat strategi serta keputusan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Adanya kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai salah satu mekanisme penilaian kegiatan operasional manajemen perusahaan.

Menurut Undang-Undang republik Indonesia No. 10 tahun 1998, kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut:

- a. *Funding* atau menghimpun dana dari masyarakat.
- b. *Lending* atau menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

c. *Services* atau memberikan jasa-jasa bank

Perbankan merupakan badan usaha yang tujuan utamanya adalah menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*leading*) serta jasa-jasa servis perbankan (*services*). Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan, sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya. Hal ini dilakukan untuk menyejahterakan taraf hidup masyarakat lain. Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan cara memberikan dana secara kredit agar perekonomian dapat berkembang. Dalam menjalankan badan usaha ini yang terpenting adalah kepercayaan dari masyarakat, oleh karena itu pihak manajemen perbankan harus menjaga kepercayaan tersebut. Cerminan dari tingginya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut yaitu dilihat dari besarnya dana simpanan seperti tabungan, deposito dan giro.

Setiawati (2010) jenis bank dapat dibedakan berdasarkan:

- a. Dilihat dari segi fungsinya, terdiri dari bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- b. Dilihat dari segi kepemilikannya, terdiri dari bank milik pemerintah, milik swasta nasional, milik asing, dan bank milik campuran.

- c. Dilihat dari segi status, terdiri dari bank devisa dan bank non-devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa.
- d. Dilihat dari segi cara menentukan harga, terdiri dari bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syari'ah.

Kinerja keuangan di dalam perusahaan industri perbankan dapat diukur melalui tiga rasio (Indriani, 2010), antara lain:

1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang tujuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo dalam suatu perbankan (Indriani, 2010). Berikut rasio yang digunakan dalam penilaian kinerja suatu perbankan: *cash ratio*, *reserve requirement*, *load to deposit ratio* (LDR) dan rasio kewajiban bersih call money

2. Rasio rentabilitas

Rasio rentabilitas merupakan salah satu alat yang dimanfaatkan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut (Indriani, 2010). Berikut rasio rentabilitas yang digunakan dalam penilaian kinerja suatu perbankan: return on assets (ROA), return on equity (ROE), rasio biaya operasional, dan net profit margin (NPM).

3. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan suatu perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan perbankan untuk memenuhi kewajiban lainnya jika terjadi likuidasi (Indriani, 2010). Berikut rasio solvabilitas yang digunakan dalam penilaian kinerja suatu perbankan: *capital adequacy ratio* (CAR), *debt to equity ratio* (DER), dan *long-term debt to assets ratio*.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap kinerja atau kegiatan operasional dalam satu periode. Dalam menyusun sebuah laporan keuangan suatu perbankan dituntut untuk memenuhi beberapa kriteria dari Bank Indonesia sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor No 6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Salah satu penilaian pada bank umum yaitu dengan pendekatan ini menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat berpengaruh pada besarnya modal (Indriani, 2010). Dalam hal ini, modal pada perbankan berfungsi untuk melindungi pemilik dana dari kerugian yang terjadi dan menjaga kepercayaan masyarakat, menutup risiko operasional yang dapat terjadi, menghapuskan aset yang *net performing loan*

(NPL), dan sumber pendanaan pendahuluan CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank yang dapat ditutup oleh ekuitas bank yang tersedia. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin baik kondisi sebuah bank. BI menetapkan bahwa nilai CAR harus selalu dipertahankan dengan nilai minimum yaitu 8 persen.

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan nilai untuk menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar (Ansori dan Wahidahwati, 2014). Semakin besar jumlah penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang di perusahaan tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat. Perusahaan memiliki ukuran yang sangat beragam dan tidak ada standar tertentu dalam menentukan besarnya ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan maka perusahaan tersebut harus lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya terutama perihal pelaporan keuangannya. Hal ini dikarenakan perusahaan berukuran besar menjadi sorotan bagi masyarakat (Ningsaptiti 2010).

Bagi investor, ukuran perusahaan ini digunakan untuk menilai aset dan kinerja perusahaan, yang mana hal ini dilakukan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan bagi pemerintah, ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya pajak yang akan disetorkan perusahaan kepada pemerintah. Disisi lain perusahaan juga berusaha untuk menjaga citranya di

hadapan investor, masyarakat maupun pemerintah. Salah satu cara agar perusahaan dapat mempertahankan citranya yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan individual tersebut, semakin besar perusahaan maka lebih banyak memiliki dorongan terhadap manajemen laba (Watts dan Zimmerman, 1990). Sehingga dengan kata lain, ukuran perusahaan ini merupakan variabel yang juga mempengaruhi manajemen laba.

7. Manajemen Laba (*Earnings Management*)

Manajemen Laba (*Earnings management*) adalah salah satu tindakan manajemen perusahaan untuk memainkan angka dalam penyusunan sebuah laporan keuangan eksternal yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak manajemen perusahaan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individual, disisi lain manajemen laba merupakan sebuah tindakan untuk mengungkap laporan keuangan tidak berdasarkan kegiatan operasi yang senyatanya (Schipper, 1989). Rahmayanti (2012), menyatakan bahwa manajemen laba juga dapat diartikan sebagai instruksi dari pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan laba individu. Tujuannya agar para manajemen perusahaan dipandang mempunyai kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat laba pada pelaporan laporan keuangan cenderung stabil. Para investor atau pemegang saham akan tertarik pada perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Adanya praktik manajemen laba ini dapat

memberikan dampak yaitu menurunnya kepercayaan pengguna laporan terhadap laporan keuangan tersebut.

Pada masa kini, pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan sangat cepat. Setiap perusahaan memiliki kondisi perusahaan yang berbeda-beda dengan karakteristik yang berbeda-beda pula (Putri, 2017). Hal ini mengakibatkan adanya fleksibilitas atau kelonggaran bagi para manajemen perusahaan dalam memilih dan menetapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kondisi perusahaan untuk menyusun sebuah laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disusun manajemen perusahaan dapat menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan yang sesuai dengan realita yang sebenarnya (Healy dan Wahlen, 1999).

Nazir (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kelonggaran yang diberikan kepada manajemen perusahaan ini justru disalahgunakan untuk melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan untuk menarik para investor. Dalam hal ini, manajemen perusahaan mempermainkan atau menaik dan turunkan angka-angka pada laporan keuangan. Para investor hanya tertarik pada angka pendapatan yang diterima perusahaan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga pihak manajemen perusahaan biasanya memainkan angka pada akun tersebut. Salah satunya yang dilakukan manajemen perusahaan yaitu mempercepat atau memperlambat pendapatan dan biaya yang diterima dan dikeluarkan perusahaan.

Berbeda dengan perusahaan lainnya, perusahaan industri perbankan mempunyai karakteristik yang unik dibanding perusahaan industri lainnya (Putri, 2017). Perusahaan industri harus memenuhi persyaratan Bank Indonesia bahwa modal yang dimiliki perusahaan tidak boleh lebih rendah dari nilai CAR yang sudah ditetapkan. Selain itu, dalam perusahaan industri perbankan harus menjunjung tinggi transparansi atau keterbukaan sebuah laporan keuangan. Dalam hal ini, transparansi akan menimbulkan dampak positif dari sisi pengguna laporan keuangan yaitu, meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap bank tersebut (Putri dan Yuyetta, 2013).

B. Penurunan Hipotesis dan Hasil Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh pihak eksternal perusahaan pada akhir tahun (Putri dan Yuyetta, 2013). Contoh kepemilikan saham oleh institusi yaitu saham yang dimiliki oleh perusahaan lain baik perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan misalnya perusahaan bank lainnya, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi serta yayasan. Carolin dan Yosephine (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk memonitor kinerja manajemen dan dapat membatasi perilaku manajemen, sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi diharapkan dapat menekan adanya praktik manajemen laba. Untuk mewujudkan keuntungan perusahaan yang tinggi maka manajemen

perusahaan dituntut untuk bisa memaksimalkan kinerjanya dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Teori keagenan menyebutkan bahwa adanya perbedaan informasi antara manajemen perusahaan sebagai agen dengan pemilik perusahaan, sedangkan manajemen perusahaan mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Kondisi ini memotivasi manajemen untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya kepada pemegang saham sebagai principal. Salah satu yang dilakukan manajemen perusahaan adalah melakukan praktik manajemen laba. Manajemen laba adalah tindakan manajer untuk memainkan angka dalam penyusunan sebuah laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individual yang tidak berdasarkan kegiatan operasi yang senyatanya (Schipper, 1989).

Penelitian kepemilikan institusional sudah banyak dilakukan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Robert dan Gagaring (2011) dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur dengan periode 2006-2009 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Carolin dan Yosephine (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut diperkuat oleh Putri dan Yuyyeta (2013) dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur dengan periode penelitian 2009-2011 menunjukkan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka dapat meminimalisir perusahaan tersebut melakukan praktik manajemen laba. Maka diajukan sebuah hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

**H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap
Manajemen Laba**

2. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan asing adalah proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing pada akhir tahun. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 pihak asing yang dimaksud adalah warga negara, badan usaha dan pemerintah asing yang berdomisili di luar negeri kemudian menanamkan sebagian dari modalnya berupa rupiah ataupun mata uang asing itu sendiri pada perusahaan di Indonesia. Adanya proporsi kepemilikan saham oleh pihak asing dapat dijadikan sebagai alat pengawasan dalam menjalankan kinerjanya dan membatasi perilaku bagi manajemen perusahaan. Bank yang memiliki struktur kepemilikan mayoritas investor asing akan cenderung melakukan manajemen laba (Putri, 2017). Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan Faranita (2017) bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan menyajikan laporan keuangan yang terpercaya dan mengubah tingkat asimetri informasi menjadi lebih rendah. Peningkatan pengetahuan akuntansi dan tata kelola perusahaan yang diperkuat seluruh investor asing akan memungkinkan

perusahaan untuk mengawasi sistem pelaporan keuangan dan kegiatan operasi yang lebih efisien. Hal ini berkaitan dengan keputusannya dalam menanamkan sebagian modalnya pada perusahaan di Indonesia.

Perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham menimbulkan adanya konflik peran. Manajemen perusahaan dituntut untuk menghasilkan laba perusahaan yang tinggi dari aktivitas operasional yang dijalankan. Salah satu cara yang dapat dilakukan manajer adalah memaksimalkan sumber daya yang tersedia sehingga dapat memenuhi target. Pada dasarnya investor atau pemegang saham cenderung menginginkan profit dan nilai pengembalian atas investasi yang lebih tinggi atas investasinya. Namun pada kenyataannya laba tersebut cenderung bersifat fluktuatif. Perolehan laba yang besar merupakan pencapaian yang diinginkan pemegang saham. Sehingga kondisi ini memicu manajemen perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba. Tindakan tersebut dilakukan agar mempertahankan investor bahkan menarik investor baru.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alzoubi (2016) dan Faranita (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Faranita (2017) menggunakan empat tahun penelitian yaitu tahun 2012-2015, keduanya menggunakan sampel perusahaan yaitu perusahaan manufaktur. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka dapat meminimalisir

perusahaan tersebut melakukan praktik manajemen laba. Maka diajukan sebuah hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₂: Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap Manajemen

Laba

3. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba

Reputasi akuntan terbentuk sejalan dengan pengembangan keahlian spesifik industri. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor spesialis industri dapat mengurangi dan mencegah adanya praktik manajemen laba (Saffudiiin, 2012). Dalam penelitian ini kualitas audit diproksikan dengan auditor spesialis industri. Auditor spesialis industri diperlukan sebagai pihak ketiga yang memiliki peran sebagai mediator yang memiliki peran sebagai pengawasan terhadap laporan keuangan antara pihak manajemen dengan pemegang saham atau investor. Dalam hal ini, auditor spesialis industri yang memiliki kredibilitas yang memahami kondisi suatu perusahaan dapat meminimalisir adanya *agency problem*. Laporan keuangan dengan kualitas audit yang tinggi akan menambah kepercayaan bagi pemegang saham atau investor (Ningsaptiti, 2010).

Auditor spesialis industri dapat memberikan hasil audit yang lebih berkualitas daripada auditor yang bukan pada bidangnya. Hal ini terjadi karena auditor spesialis bekerja berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kerja yang mereka dapat sebelumnya sehingga auditor spesialis industri dapat memahami kondisi perusahaan klien nya dan mereka dapat mengurangi atau

mengatasi adanya praktik manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Yuyetta (2013), dengan menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur dengan periode penelitian 2009-2011 menunjukkan bahwa auditor spesialisasi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat Amijaya dkk, (2013) dengan sampel penelitian yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian 2008-2011. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas audit dengan proksi audit spesialis industri dalam suatu perusahaan maka dapat meminimalisir perusahaan tersebut melakukan praktik manajemen laba. Maka diajukan sebuah hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H₃: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen

Laba

4. Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Manajemen Laba

Perkembangan dan pertumbuhan suatu perusahaan pada masa kini menjadi sangat pesat, sehingga memotivasi perusahaan khususnya pemilik perusahaan untuk bersaing mendapatkan suntikan dana dari pihak eksternal, yaitu investor. Pengukuran kinerja keuangan dibutuhkan sebagai pengendalian efektif bagi perusahaan untuk merancang strategi untuk mendapatkan hasil kinerja manajemen perusahaan yang maksimal. Dalam hal ini, kinerja keuangan merupakan sebuah cerminan dari kinerja yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam periode yang telah ditentukan.

Kinerja keuangan dalam penelitian ini akan diukur dengan pendekatan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR merupakan alat pengukur untuk kecukupan modal yang dimiliki suatu perbankan guna menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko yang diberikan (Setiawati, 2010). Rasio ini juga memaparkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan modal dan kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengawasi serta mengontrol risiko yang akan muncul yang berpengaruh bagi besarnya modal.

Sesuai dengan fungsinya perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sebagai pinjaman (Setiawati, 2010). Tingkat kesehatan suatu bank menjadi tolak ukur penilaian bagi investor dan masyarakat, sehingga bank tersebut harus menjaga kepercayaan pihak penanam modal karena sebagian dari modal perbankan diperoleh dari mereka. Disisi lain, kondisi perusahaan cenderung tidak atau kurang stabil untuk mendapatkan laba dalam tahun berjalan. Hal ini dapat berdampak pada pihak eksternal yang ingin menanamkan modalnya mengingat mereka hanya menanamkan modalnya pada perusahaan yang menguntungkan bagi mereka. Sehingga sering kali muncul adanya konflik peran antara pemilik dengan manajemen perusahaan. Pada kesempatan yang lain, kelonggaran kondisi seperti ini sering disalahgunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba untuk memenuhi keinginan pemilik perusahaan. Dengan

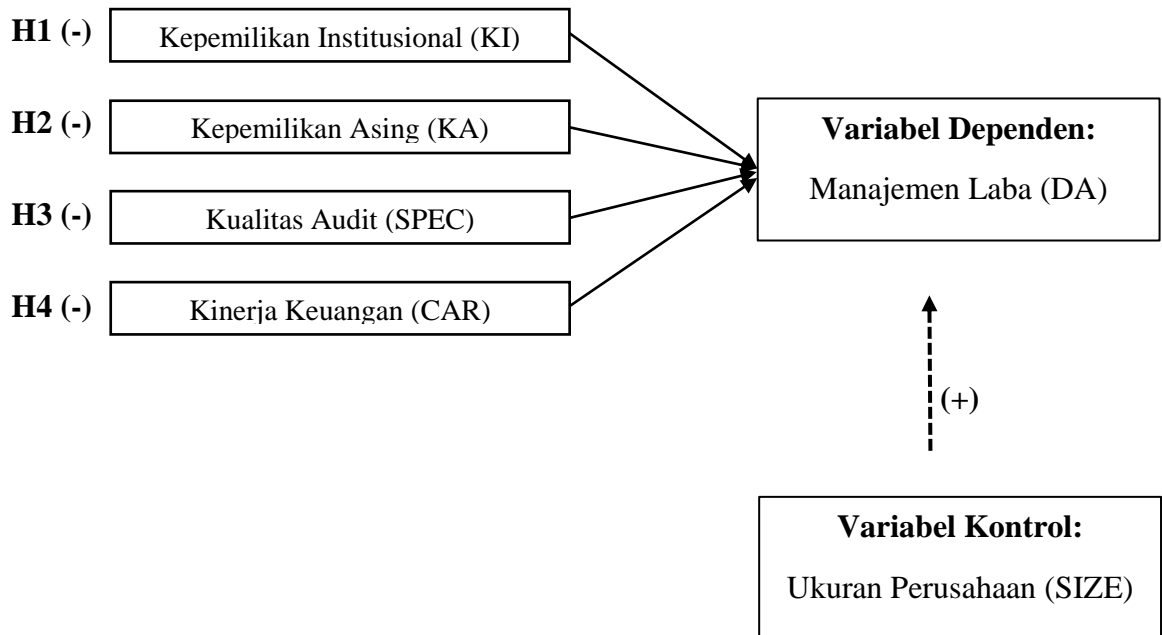
dihimbau dengan adanya bonus atau insentif tambahan apabila suatu target yang diinginkan sudah tercapai.

Setiawati (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai CAR suatu bank tersebut maka semakin baik pula kondisi bank tersebut. Dengan kata lain, apabila tingkat kesehatan bank menurun maka praktik manajemen laba akan semakin meningkat. Indriani (2010) menguji kinerja keuangan terhadap manajemen laba dalam menggunakan sampel penelitian yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008 hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi angka kecukupan modal dalam suatu perusahaan maka dapat meminimalisir perusahaan tersebut melakukan praktik manajemen laba. Maka diajukan sebuah hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H4: Kecukupan Modal berpengaruh negatif terhadap Manajemen

Laba

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian